Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2020



Dipindai dengan CamScanner

Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder.* Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai budaya. Budaya *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. BPR Depo Mitra Mandiri dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap *survive* ditengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata Kelola yang baik menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan visi dan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini kemudian akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menekankan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dua hal penting. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder.* Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independen, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan

Dipindai dengan CamScanner

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang ingin dicapai PT. BPR Depo Mitra Mandiri dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Depo Mitra Mandiri ditujukan antara lain untuk:

a. Melaksanakan visi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk menjadi "Perusahaan yang unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan pemilik dan *stakeholder.*"

b. Melaksanakan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk "Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan."

c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders)* dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

e. Meningkatkan kepercayaan para investor.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dilakukan dengan mengacu kepada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jas Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan

Dipindai dengan CamScanner

Mandiri dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

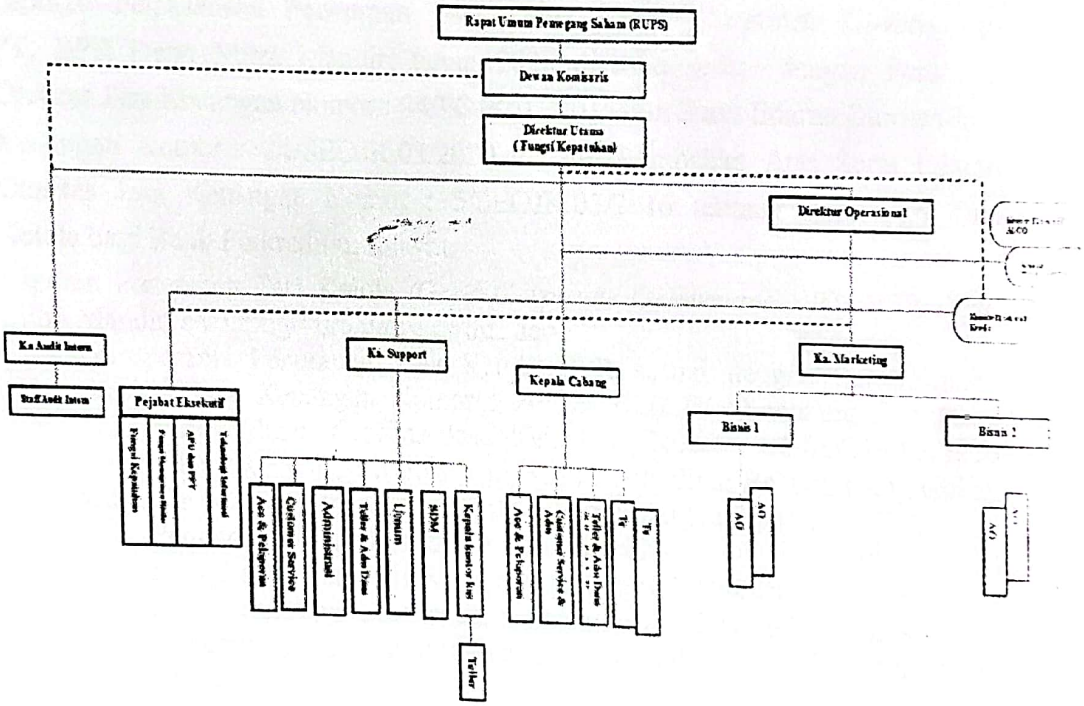
Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola BPR

4. Struktur Organisasi PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Depo Mitra Mandiri mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri

PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI
STRUKTUR ORGANISASI



Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama;
4. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
5. Direktur Yang Membawahkan Operasional;
6. Ka. Support;
7. Pejabat Eksekutif yang berfungsi sebagai :

Dipindai dengan CamScanner

7. Pejabat Eksekutif yang berfungsi sebagai :
   a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
   b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko;
   c. Pejabat Eksekutif APU dan PPT;
   d. Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi;
8. Ka. Audit Intern;
9. Staff Audit Intern;
10. Ka. Marketing;
11. Ka. Cabang;
12. Staff Penunjang Operasional dan Bisnis.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Keloa (*Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola *(Good Corporate Govermance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling kurang meliputi :
   a. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu :
      i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
      ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
   b. Kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :
      i. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR.
      ii. Kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain.
   c. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR yaitu :
      i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.
      ii. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.
   d. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT. BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :
      i. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR.
      ii. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan

Dipindai dengan CamScanner

lain.

e. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham yaitu :
   i. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
   ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditepatkan berdasarkan RUPS yaitu :
   i. Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.
   ii. Uraian Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

g. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

i. Jumlah Penyimpangan Intern *(Internal Fraud)*.

j. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.

k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2020

C. TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA

a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola yaitu :

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: I Gede Suprapta
	NIK*)	: 3674061108620007
	Jabatan	: Direktur Utama dan/atau yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Utama dan/atau yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. *Research and Development* (R&D); c. Fungsi Kepatuhan; d. Fungsi Manajemen Risiko; e. Fungsi Teknologi Informasi; f. Penunjang Operasional; g. Sumber Daya Manusia dan Umum; h. Fungsi APU dan PPT.	
2.	Nama	: Teti Ofianti
	NIK*)	: 3276066410770005
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab:	

Dipindai dengan CamScanner

	a. Penghimpunan Dana b. Penyaluran Dana c. Literasi dan Inklusi
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**): a. Melakukan pembinaan terhadap nasabah lancar dan nasabah bermasalah, serta melakukan evaluasi dan membuat *action plan* untuk penanganan kredit bermasalah. b. Melakukan rapat *Alco* setiap 1 (satu) minggu sekali untuk memonitoring pendanaan. c. Pemberian kredit dilakukan secara selektif dan mempersiapkan analisa perusahaan sebelum melakukan kerjasama untuk pemberian kredit karyawan. d. Pelaksanaan laporan berjalan cukup baik, pending administrasi dan filling dalam proses penyelesaian serta telah melakukan penyempurnaan kebijakan prosedur sebagai berikut : - Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Pelaporan, Permintaan Informasi Debitur dan Penyelesaian Pengaduan Informasi Debitur Revisi 1 - Pedoman Kebijakan dan Prosedur Rencana Kerja Harian Account Officer (AO), Marketing, dan Junior Account Officer (JAO) Revisi I - Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Revisi II	

ii. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT. BPR Depo Mitra Mandiri

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Harun Rasyid Syuhada
	NIK*)	: 3175071808540005
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Penghimpunan Dana b. Penyaluran Dana c. Literasi dan Inklusi	
2.	Nama	: RM Wahyu Yulianto
	NIK*)	: 3175051807590002
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. *Research and Development* (R&D); c. Fungsi Kepatuhan; d. Fungsi Manajemen Risiko;	

Dipindai dengan CamScanner

	d. Fungsi Manajemen Risiko; e. Fungsi Teknologi Informasi; f. Penunjang Operasional; g. Sumber Daya Manusia dan Umum; h. Fungsi APU dan PPT.
Rekomendasi kepada Direksi: a. Melakukan pembinaan nasabah dengan target tetap lancar, sedangkan untuk nasabah bermasalah agar dilokalisir, dipetakan, dan dicari solusi. b. Memperhatikan pendanaan untuk mencegah kelebihan dana/*idle* dan memastikan penempatan dana aman serta dapat menutup biaya dana. c. Pemberian kredit secara selektif tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian, minimal dengan mempertimbangkan *sources of repayment* yang meyakinkan. Sedangkan kerjasama baru untuk kredit karyawan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan perkembangan bisnis perusahaannya. d. Kewajiban penyelesaian laporan, pending administrasi, filling, serta penyempurnaan kebijakan prosedur dan lain-lainnya tetap dilakukan.	

b. Kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :

i. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

c. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Dipindai dengan CamScanner

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

d. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :

i. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Harun Rasyid Syuhada	3175071808540005	251.000.000	5
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Harun Rasyid Syuhada	3175071808540005	Tidak Ada	Tidak Ada	TidakAda
2.	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

e. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Dipindai dengan CamScanner

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Harun Rasyid Syuhada	3175071808540005	Tidak Ada	Tidak Ada	Sonni Dwi Harsono – Memberikan Penghasilan
2.	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Harun Rasyid Syuhada	3175071808540005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

f. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

i. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah orang	Jumlah Keseluruhan
1	Gaji	2	777.600.000	2	167.400.000
2	Tunjangan	2	426.113.320	2	33.519.732
3	Tantiem	2	126.000.000	2	38.500.000
4	Kompensasi berbasis saham		Tidak ada		Tidak ada
5	Remunerasi lainnya		Tidak ada		Tidak ada

ii. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil untuk fasilitas Direktur Utama dan Direktur	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Dipindai dengan CamScanner

g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan

No	Keterangan	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2,12 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,20 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,04 : 1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	6,82 : 1
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	5,94 : 1

h. Frekuensi Rapat Dewan-Komisaris

i. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12-Mar-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - Evaluasi kebutuhan kantor pusat - Pengembangan SDM - Pelaporan ke OJK - APU dan PPT - Fokus terhadap target sesuai RBB tahun 2020
2	20-Apr-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - Perbaikan Kondisi Kantor Pusat - Pendidikan Sertifikasi untuk para Manager - Pelaporan ke OJK - APU dan PPT
3	19-May-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - Perbaikan Kondisi Kantor Pusat - Pendidikan Sertifikasi untuk para Manager - APU dan PPT - Fokus terhadap target sesuai RBB tahun 2020
4	18-Jun-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - APU dan PPT - Fokus terhadap target sesuai RBB tahun 2020
5	14-Jul-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - APU dan PPT - Fokus terhadap target sesuai RBB tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
6	07-Aug-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - APU dan PPT - Target RBB 2020 yang telah direvisi
7	10-Dec-20	2	- Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Rencana Bisnis - Perencanaan dan pengembangan SDM

ii. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran ** (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Harun Rasyid Syuhada	3175071808540000	7	—	100%
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590000	7	—	100%

i. Jumlah penyimpangan intern *(internal fraud)*

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Selama tahun 2020 atau tahun sebelumnya PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak ada penyimpangan internal dengan laporan sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan dalam Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

j. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Depo Mitra

Dipindai dengan CamScanner

Mandiri tidak ada, adapun laporannya sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kepentingan politik selama periode tahun 2020 sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-

D. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2020.

Pada tahun 2020, PT. BPR Depo Mitra Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 mengenai tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Kualitatif dan
2. Aspek Kuantitatif

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 mengenai tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat penerapan Tata Kelola diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, namun dikarenakan PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- maka untuk faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi komite tidak dinilai, maka faktor yang dinilai hanya sebanyak 10 (sepuluh) faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penerapan fungsi Audit Intern;
6. Penerapan fungsi Auditor Ekstern;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Rencana Keja Strategis;
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada Tahun 2020 total penilaian tata kelola 1,91 dan dikategorikan ke dalam **"Peringkat 2" ("Baik").**

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Depo Mitra Mandiri Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2020

Nilai	Peringkat Komposit
1.91	2 (Baik)

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek Kualitatif dan Kuantitatif pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola mengenai Manajemen Resiko telah disusun dengan nomor 001/KEB-DEPO/0619
2. BPR telah menyampaikan rencana kerja secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
3. BPR telah menyampaikan Laporan Publikasi triwulan sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu
4. Sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur yang sangat memadai.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Posisi Laporan tahun 2020

Depok, 28 April 2021

Dibuat oleh,

I Gede Suprapta
Direktur Utama

Disetujui oleh,

Harun Rasyid Syuhada
Komisaris Utama

Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.91	Baik
Analisis	
1. Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola mengenai Manajemen Resiko telah dilakukan penyusunan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko BPR dengan nomor 001/KEB-DEPO/0619 2. Sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur yang sangat memadai.	

Depok, 28 April 2021

Dibuat oleh,

I Gede Suprapta
Direktur Utama

Disetujui oleh,

Harun Rasyid Syuhada
Komisaris Utama

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI

maju bersama

Nomor : 016/OJK-DEPO/0421
Lamp : 1 (satu) bendel

Depok, 29 April 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Regional Pengawasan Bank 2 Jawa Barat
Jl.Ir.H.Djuanda No.152, Dago
Bandung 40135

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Depo Mitra Mandiri posisi Tahun 2020

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dimana pada Pasal 75 ayat 2 dan 3 mengenai Laporan Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Maka bersama ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2020 (terlampir).

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor telp. (021) 752 2323 dengan Sdri. Umamah Nabila Zahra dan dapat juga memberikan informasi ke alamat email bpr.depomitramandiri_ojk@yahoo.com.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Depo Mitra Mandiri

I Gede Suprapta
Direktur Utama

Tembusan : - Dewan Komisaris BPR Depo Mitra Mandiri
- Arsip

Kantor Pusat : Jl. Margonda Raya No. 23 B-2, Depok 16431, Tlp. (021) 752 2323 (Hunting), Fax. (021) 7720 2767, E-mail : bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id, Website : www.bprdepomitramandiri.co.id
Cabang Pondok Aren : Komplek Ruko Regia Blok RB-1 No. 36, Jl. Graha Bintaro Utama Tangerang Selatan 15226, Telp. (021) 7345 0840, Fax. (021) 7345 0746, E-mail : dmm.pondokaren@yahoo.co.id
Cabang Cibinong : Komplek Ruko Perum Cibinong Griya Asri, Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Cibinong 16914, Telp. (021) 8791 9767, Fax. (021) 8791 9768, E-mail : dmm.cibinong@...
Kantor Kas : Jl. Abdul Wahab No 7-A Sawangan - Depok 16511, Telp. (021) 2277 9098, Fax. (021) 2277 9098, E-mail : dmm.sawangan@yahoo.com

Dipindai dengan CamScanner